

RINGKASAN

Meski telah cukup banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana nasional (GKBN), namun masih jarang yang memusatkan perhatian pada pola implementasi kebijakan yang dilakukan oleh birokrat di lini lapangan. Penelitian ini mencoba memahami strategi implementasi kebijakan yang dilakukan petugas lini lapangan dalam penyertaan masyarakat melaksanakan GKBN. Lebih jauh lagi, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan pola implementasi serta pola kecenderungan pola implementasi serta pola partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan GKBN.

Penelitian ini dilakukan di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan), Mataram Timur (Kecamatan Mataram) dan Babakan (Kecamatan Cakranegara), Kodya Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jumlah subjek penelitian yang diambil sebanyak 38 orang. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap responden terpilih. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menyajikan data secara terinci dan interpretasi dan kemudian mengkomparasikannya antar kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas lini lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan menggunakan pola atas-bawah (top-down). Seluruh proses penumbuhan dan pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dilakukan dengan pendekatan dari atas dengan bantuan lurah. Warga masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan hingga evaluasi kegiatan kecuali sebagai pelaksana program yang ditetapkan birokrat. Akibatnya, warga masyarakat cenderung berpartisipasi secara parsial-vertikal, yakni sebagai objek pelaksana yang sepenuhnya tergantung kepada alokasi sumber dari pemerintah.

Terjadinya kecenderungan pola implementasi atas-bawah dan pola partisipasi parsial-vertikal warga masyarakat memiliki hubungan kausal. Kuatnya peran pemerintah melalui pengalokasian sumber secara sepihak mengakibatkan warga masyarakat berpartisipasi secara mekanis dan tergantung. Fungsi birokrat lebih dominan sebagai pengatur dan pendisiplin warga masyarakat agar berperan dalam melaksanakan GKBN. Warga masyarakat berperan serta melalui IMP merupakan bentuk kooptasi negara dan merupakan mobilisasi warga masyarakat agar secara patuh melaksanakan kebijakan pemerintah.